

PENGARUH DANA OTONOMI KHUSUS, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DENGAN BELANJA MODAL SEBAGAI VARIABEL PEMEDIASI

Margaretha Turot

E-mail: margarethturot@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of the special autonomy fund, regional income and fund balance on human development index by capital expenditure as a intervening variable in the districts / cities in West Papua province. The source of data used in this study was secondary data from APBD, which contains data on the realization of the special autonomy fund, regional income, fund balance and the capital expenditure budget, and the data of human development index obtained from BPS West Papua province during 2010 to the 2014. The data analysis technique used is Partial Least Square (PLS). The results showed that the special autonomy fund gives the positive and significant effect to capital expenditure, the regional income gives the positive and significant effect to capital expenditure, the balance fund gives the positive and significant effect to capital expenditure, the special autonomy fund gives the positive and significant effect to human development index, the regional income gives the positive and significant effect to human development index, the balance funds gives the negative and not significant effect to human development index, capital expenditure gives the negative and significant effect to human development index, capital expenditures mediate partial influence of special autonomy fund to human development index, capital expenditure medi-

ate partial influence regional income to development index human, and capital expenditure perfect mediate effect of balance fund to human development index.

Keywords: special autonomy fund, regional income, fund balance, capital expenditure, human development index

JEL Classification: H72, R11, R53

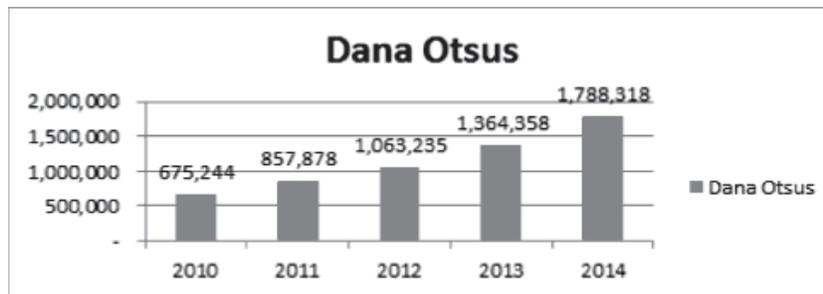
PENDAHULUAN

Salah satu tujuan reformasi yang dicita-citakan untuk dicapai adalah pemberian otonomi daerah yang seluas-luasnya. Pemberian hak otonomi dimaksud untuk memberikan keleluasan bagi pemerintah daerah agar dapat menggali sumber-sumber keuangan daerah sendiri. Tujuan yang ingin dicapai yaitu, peningkatan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Adapun cara yang digunakan pemerintah yakni Otonomi daerah yang berperan dalam pembangunan baik daerah maupun nasional yang telah diberlakukan sejak 1 Januari 2001. Pelaksanaan otonomi daerah merupakan momen yang tepat untuk memberi peran yang lebih besar kepada pemerintah daerah dan para pelaku ekonomi daerah dalam

Hirawan (2007) menyatakan bahwa otonomi daerah merupakan landasan dari pelaksanaan desentralisasi untuk memenuhi tujuan demokratisasi dan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya kewenangan yang luas bagi pemerintah daerah, maka diharapkan tujuan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Untuk merealisasikan agenda tersebut, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Tujuan utama dari kedua undang-undang tersebut adalah mendorong terlaksananya desentralisasi di Indonesia.

Otonomi daerah dapat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membentuk daerah otonomnya sendiri, salah satu daerah yang dapat

membentuk daerah otonom sendiri adalah provinsi Papua Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008. Di era otonomi daerah terdapat beberapa daerah di Indonesia yang mendapatkan perlakuan khusus, diantaranya adalah daerah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Perlakuan khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Dana Otonomi Khusus. Adapun tujuan utama dari pelaksanaan otonomi khusus adalah dapat mengurangi kesenjangan antara Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dengan provinsi lainnya di Indonesia. Provinsi Papua Barat yang terdiri 12 kabupaten dan 1 kota mendapatkan dana transfer dari pemerintah pusat berupa Dana Otonomi Khusus relatif besar. Dana transfer dari pusat terus mengalami peningkatan serta kontribusinya terhadap penerimaan daerah sangat besar seperti ditunjukkan pada Gambar 1.

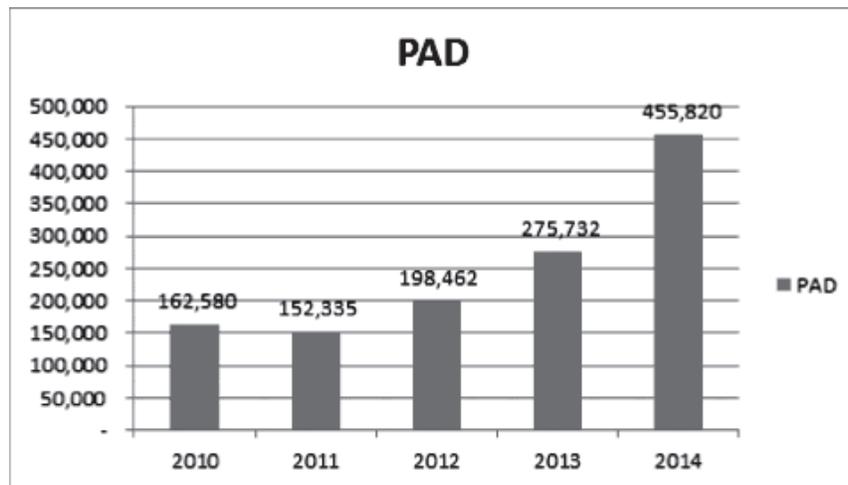


Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan.

Gambar 1
Dana Otonomi Khusus Kabupaten/Kota. Tahun 2010-2014
(jutaan rupiah)

Dana transfer tersebut diprioritaskan untuk belanja langsung yang diharapkan mampu memacu perkembangan pembangunan manusia dan daerah di Provinsi Papua Barat, yakni melalui pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan infrastruktur. Untuk meningkatkan pembangunan daerah, tentu membutuhkan pendapatan yang cukup dalam membiayai semua pengeluaran pemerintah. Salah satu sumber pendapatan yang diperoleh daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah, maka daerah

lebih leluasa dalam merencanakan dan mengalokasikan kegiatan atau pengeluaran yang akan berdampak terhadap peningkatan pembangunan daerah terutama pembangunan infrastruktur. Pendapatan Asli Daerah yang tinggi akan mempengaruhi pembangunan dan perkembangan di daerah. Hal ini dapat direalisasikan dalam bentuk pengadaan fasilitas, infrastruktur, dan sarana prasarana yang ditujukan untuk kepentingan publik. Semua pengeluaran tersebut dialokasikan melalui belanja modal. Berikut disajikan PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat dari tahun 2010-2014.



Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan.

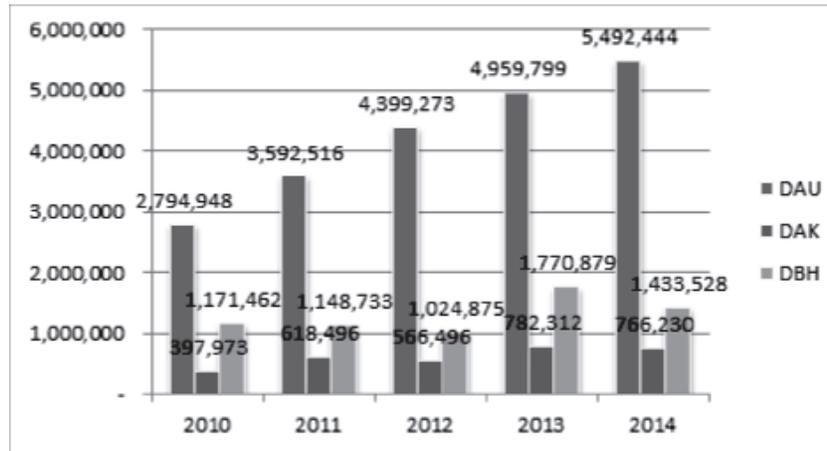
Gambar 2
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota, Tahun 2010-2014
(jutaan rupiah)

Secara keseluruhan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap penerimaan daerah di Provinsi Papua Barat selama periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 mengalami peningkatan. Peningkatan dan penurunan PAD tergantung pada hasil kekayaan yang diperoleh setiap daerah. Semakin baik Pendapatan Asli Daerah suatu daerah maka semakin besar pula alokasi belanja modalnya. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dapat meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik. Salah satu aspek yang sangat krusial dalam desentralisasi ekonomi adalah persoalan desentralisasi fiskal. Secara konseptual, desentralisasi fiskal mensyaratkan bahwa setiap kewenangan yang diberikan kepada daerah harus disertai dengan pembiayaan yang besarnya sesuai dengan beban kewenangan tersebut. Oleh karena itu pada tahun 2001 muncul konsep dana perimbangan sebagai instrumen pembiayaan daerah. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dengan tujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dan pemerintahan daerah dan antar pemerintah

pusat. Berikut disajikan dana perimbangan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat dari tahun 2010-2014.

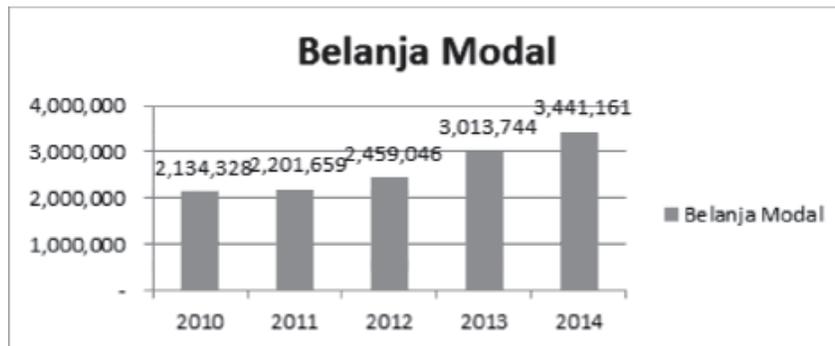
Berdasar Gambar 3 dana perimbangan mengalami peningkatan dari tahun 2010-2014. Hal ini mengindikasikan bahwa dengan adanya dana perimbangan yang tinggi, ketergantungan daerah terhadap dana perimbangan menjadi sangat tinggi dan kemandirian daerah penghasil PAD semakin menurun.

Otonomi daerah serta desentralisasi tidak bisa terlepas dari pelaksanaan pembangunan daerah. Pembangunan daerah merupakan wujud upaya peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahannya. Pembangunan daerah tidak mungkin diwujudkan tanpa adanya pembangunan fisik berupa sarana dan prasarana. Pembangunan fisik tersebut dapat dilaksanakan jika perencanaannya dimasukkan dalam APBD pada pos belanja, khususnya belanja modal. Alokasi belanja modal dibentuk melalui proses penyusunan anggaran. Tentunya dalam pengalokasian belanja modal sebagai pendukung proses pembangunan, peran proses penganggaran sangatlah signifikan. Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat dari tahun 2010-2014 disajikan pada Gambar 4.



Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

Gambar 3
Dana Perimbangan Kabupaten/Kota, Tahun 2010-2014
 (jutaan rupiah)

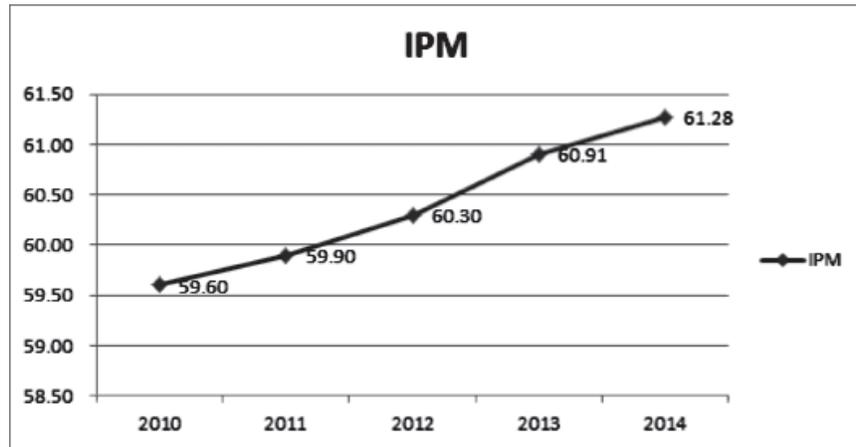


Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan.

Gambar 4
Belanja Modal Kabupaten/Kota, Tahun 2010-2014
 (Jutaan rupiah)

Gambar 4 menunjukkan bahwa belanja modal pada Kabupaten/Kota Propinsi Papua Barat tahun 2010-2014 mengalami peningkatan setiap tahun. Dengan adanya peningkatan belanja modal diharapkan dapat memberi pengaruh yang positif bagi penurunan jumlah penduduk miskin di Papua Barat. Ketersediaan infrastruktur yang memadai juga akan memudahkan masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi maupun sosial kemasyarakatan serta memberikan kesejahteraan

kepada masyarakat. Salah satu cara untuk mengukur tingkat kesejahteraan adalah melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yaitu umur panjang dan sehat (kesehatan), pengetahuan (pendidikan), dan kehidupan yang layak (ekonomi). Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat dari tahun 2010-2014 disajikan pada Gambar 5.



Sumber: Diolah dari BPS Papua Barat

Gambar 5
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Tahun 2010-2014

Secara umum IPM pada periode 2010 sampai dengan 2014 menunjukkan pertumbuhan positif. IPM Papua Barat pada tahun 2014 adalah sebesar 61,28 persen. IPM Provinsi Papua Barat berada pada peringkat 33 secara nasional pada tahun 2015.

Tujuan penelitian ini untuk menguji dan menganalisis 1) pengaruh dana otonomi khusus terhadap belanja modal; 2) pengaruh dana otonomi khusus terhadap indeks pembangunan manusia; 3) pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal; 4) pengaruh pendapatan asli daerah terhadap indeks pembangunan manusia; 5) pengaruh dana perimbangan terhadap belanja modal; 6) pengaruh dana perimbangan terhadap indeks pembangunan manusia; 7) pengaruh belanja modal terhadap indeks pembangunan manusia; 8) pengaruh dana otonomi khusus terhadap indeks pembangunan manusia melalui belanja modal; 9) pengaruh pendapatan asli daerah terhadap indeks pembangunan manusia melalui belanja modal; dan 10) pengaruh dana perimbangan terhadap indeks pembangunan manusia melalui belanja modal

MATERI DAN METOFE PENELITIAN

Definisi desentralisasi menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom

untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi terfokus pada tingkat kabupaten dan kota. Kedua pemerintahan tersebut berada pada level ketiga setelah pemerintah pusat dan provinsi.

Secara filosofis otonomi daerah adalah pemberdayaan dan intensifikasi sumber-sumber daya yang ada di daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 Ayat 5 “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Dana Otonomi Khusus merupakan dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 yang telah diubah dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua mencerminkan upaya Pemerintah Indonesia dalam mencari solusi atas sejumlah masalah pelik di wilayah itu. Masalah-masalah ini mencakup: (1) konflik politik, terfokus pada tuntutan kemerdekaan Papua yang oleh pemerintah Indonesia dilihat sebagai gerakan separatis; (2) konflik sosial antarpenduduk Papua yang merupakan akibat dari ketiadaan solusi

atas konflik politik; dan (3) kondisi ekonomi yang buruk, terutama yang dirasakan oleh penduduk asli Papua dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia serta Tingkat kemiskinan masyarakat Papua tergolong sangat tinggi dan berada di deretan paling bawah di antara daerah termiskin di Indonesia (World Bank, 2006).

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan asli daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD, semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat. Berdasar Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 belanja modal didefinisikan sebagai pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan dan aset tetap lainnya.

Menurut BPS (2009), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran capaian pembangunan berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Indeks Pembangunan Manusia dihitung berdasarkan data yang dapat menggambarkan keempat komponen, yaitu angka harapan hidup yang mengukur keberhasilan dalam bidang kesehatan, angka melek huruf dan rata-rata lamanya bersekolah yang mengukur keberhasilan dalam bidang pendidikan, dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mengukur keberhasilan dalam bidang pembangunan untuk hidup layak.

Cut Sri Hartati (2016), hasil penelitiannya

menunjukkan bahwa Penerimaan Dana Otonomi Khusus dan TDBH Migas berpengaruh positif baik secara bersama-sama maupun secara parsial terhadap belanja modal Kabupaten/kota di Aceh. Penerimaan Dana Otonomi Khusus, TDBH Migas dan Belanja Modal baik secara bersama sama maupun secara parsial berpengaruh terhadap IPM kabupaten/kota di Aceh. Berdasar penjelasan tersebut, disusun hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1: Dana Otonomi Khusus berpengaruh positif terhadap belanja modal.

H2: Dana Otonomi Khusus berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia.

Brata (2004), menyimpulkan bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah dapat meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik. Kusnandar dan Siswantoro (2011) menyimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal. Berdasar penjelasan tersebut, disusun hipotesis penelitian sebagai berikut:

H3: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal.

Syahril (2011) membuktikan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh secara signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Berdasar penjelasan tersebut, disusun hipotesis penelitian sebagai berikut:

H4: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Darmayasa (2014), meneliti tentang Faktor Penentu Alokasi Belanja Modal dalam APBD dan menemukan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal (DBH dan DAU merupakan faktor penentu alokasi Belanja Modal). Riva Uba (2011), meneliti tentang pengaruh dana perimbangan terhadap IPM dan hasil penelitian menyimpulkan bahwa DAU, DAK, dan DBH secara simultan berpengaruh positif terhadap IPM. Berdasar penjelasan tersebut, disusun hipotesis penelitian sebagai berikut:

H5: Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

H6: Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Adi (2009), menyimpulkan Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks

Pembangunan Manusia. Hal serupa diungkapkan oleh Setyowati dan Suparwati (2012) yang menemukan hasil bahwa Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Berdasar penjelasan tersebut, disusun hipotesis penelitian sebagai berikut:

H7: Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Sumardjoko (2014) menunjukkan bahwa dana otonomi khusus berpengaruh signifikan positif terhadap belanja modal APBD Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat periode tahun 2002-2012. Belanja modal berperan sebagai variabel intervening dalam memberikan pengaruh dana otonomi khusus terhadap IPM. Setyowati dan Suparwati (2012) menemukan bahwa PAD terbukti berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (PABM), dan Belanja Modal (BM) terbukti berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Harianto (2007), menjelaskan bahwa jumlah belanja modal dipengaruhi oleh dana alokasi umum yang diterima dari Pemerintah Pusat. Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Intisari, 2011). Berdasar penjelasan tersebut, disusun hipotesis penelitian sebagai berikut:

H8: Belanja Modal memediasi pengaruh Dana Otonomi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

H9: Belanja Modal memediasi pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

H10: Belanja Modal memediasi pengaruh Dana Perimbangan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kuantitatif mengenai Pengaruh Dana Otonomi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Perimbangan terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Belanja Modal sebagai variabel pemediasi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat. Analisis data kuantitatif adalah analisis yang digunakan pada data sekunder dengan menggunakan metode statistik.

Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah kabupaten/kota Provinsi Papua Barat tahun 2010-2014. Sampel dalam penelitian ini adalah 11 Kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh, dikumpulkan, dan diolah terlebih dahulu oleh

pihak lain. Jenis dan sumber data penelitian ini adalah 1) Laporan Realisasi APBD tahun 2010-2014, yang diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah www.djpk.depkeu.go.id melalui internet dimana didokumentasi ini diperoleh data mengenai jumlah realisasi Anggaran Belanja Modal, Dana Otonomi Khusus, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Perimbangan; 2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) melalui www.bps.go.id dan BPS Provinsi Papua Barat.

Pengumpulan data dengan metode dokumentasi dimana data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan metode dokumentasi dengan mempelajari dokumen-dokumen atau data yang dibutuhkan, dilanjutkan dengan pencatatan, dan penghitungan dengan cara menghimpun informasi untuk menyelesaikan masalah berdasarkan data-data yang relevan. Sumber dan penggunaannya dengan data statistik yang didapat dari data eksternal yaitu data yang diperoleh dari BPS (Badan Pusat Statistik) dan Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah. Sifat datanya adalah data kuantitatif yaitu data yang berupa angka-angka, dan bersifat obyektif. Variabel Independen terdiri dari Penerimaan Dana Otonomi Khusus, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Perimbangan. Variabel dependen adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Variabel Pemediasi adalah Belanja Modal (BM)

Otonomi Khusus menyatakan bahwa otonomi khusus merupakan kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada provinsi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Dana otonomi khusus diperoleh dari: 2% x DAU. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan Asli Daerah meliputi, pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan asli daerah dapat dirumuskan: $PAD = HPD + RD + HPKD + LPS$

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan dibagi menjadi: Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil. Dana perimbangan dapat dirumuskan $DP = DBH + DAU + DAK$

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud. Belanja modal dapat dirumuskan: $BM = \text{Belanja tanah} + \text{belanja peralatan mesin} + \text{Belanja Gedung Bangunan} + \text{Belanja Jalan, irigasi dan jaringan} + \text{Belanja Aset Lainnya}$

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran capaian pembangunan berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM di Indonesia disusun berdasarkan tiga komponen indeks. IPM merupakan rata-rata dari ketiga komponen tersebut. Indeks pembangunan manusia dirumuskan:

$$IPM = \frac{(X1+X2+X3)}{3}$$

Model analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah model analisis Partial Least Square (PLS) mengikuti pola model persamaan struktural (SEM) berbasis *varians* yaitu WarpPLS yang secara simultan dapat melakukan pengujian model pengukuran sekaligus pengujian model struktural.

HASIL PENELITIAN

Analisis data pada penelitian ini menggunakan hasil statistik deskriptif dan analisis *partial least square* (PLS). Hasil pengujian analisis statistik deskriptif ditunjukkan pada Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1
Analisis Data Dengan Statistik Deskriptif

	Dana Otonomi Khusus Rp (Juta)	Pendapatan Asli Daerah Rp (Juta)	Dana Perimbangan Rp (Juta)	Belanja Modal Rp (Juta)	Indeks Pembangunan Manusia
Mean	103.149	22.619	558.020	240.043	59,52
Minimum	35.000	761	146.084	97.411	45,97
Maximum	349.776	103.976	1.157.454	650.618	75,78

Sumber: Output (Olah data).

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menghitung nilai Goodness of Fit dan melakukan pengujian hipotesis. Model struktural atau inner model pada kerangka konseptual yang dibangun

berdasarkan referensi konsep dan teori fit apabila didukung oleh data empiris. Perhitungan nilai *goodness of fit (inner model)* didasarkan pada hasil analisis SEM WarpPLS pada Tabel 2.

Tabel 2
Hasil Inner Model (Nilai R-Square)

Variabel	R- Square
Dana otonomi khusus	-
Pendapatan asli daerah	-
Dana Perimbangan	-
Belanja modal	0,72
Indeks pembangunan manusia	0,74

Sumber: Output PLS (Olah data)

$$\begin{aligned}
 Q2 &= 1 - (1 - RBMD^2)(1 - R_{IPM}^2) \\
 &= 1 - (1 - 0,72)(1 - 0,74) \\
 &= 1 - (0,28)(0,26) \\
 &= 1 - 0,0728 \\
 &= 0,93
 \end{aligned}$$

Berdasar penghitungan tersebut, diperoleh nilai *Q-Square predictive relevance* sebesar 0,93 atau 93%, sehingga model dikatakan memiliki nilai prediktif yang kuat karena variabel-variabel dalam model meliputi variabel dana otonomi khusus, pendapatan asli

daerah, dana perimbangan, dan belanja modal mampu menjelaskan variabel indeks pembangunan manusia sebesar 93% sedangkan sisanya sebesar 7% merupakan variasi variabel lain diluar model.

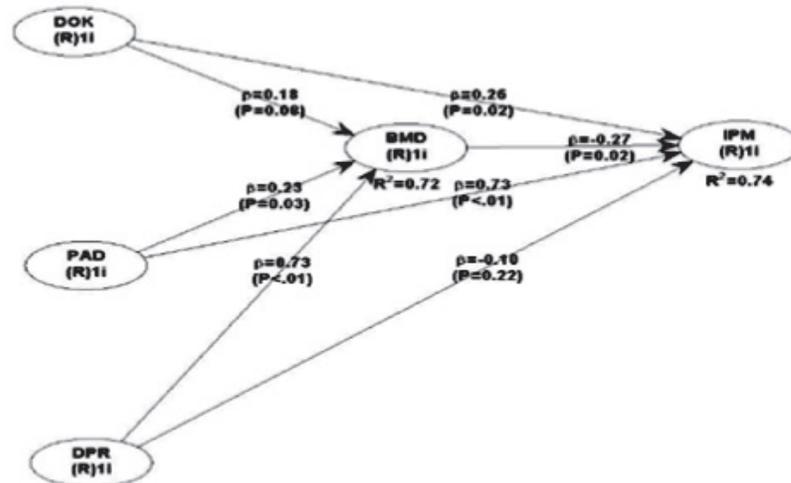
Tabel 3
Hasil Model *fit indices* dan P values

Hasil	P-Value	Kriteria	Keterangan
APC = 0,356	P < 0,001	Good if P < 0,05	Memenuhi
ARS = 0,559	P < 0,001	Good if P < 0,05	Memenuhi
AVIF = 2,187		P < 5	Memenuhi

Sumber: Output PLS (Olah data)

Berdasar analisis umum *model fit* pada Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai *average path coefficient* (APC) sebesar 0,356 dengan nilai $P = 0,001 < 0,05$, sehingga disimpulkan bahwa nilai APC dapat memenuhi kriteria untuk melihat besarnya hubungan antar variabel. Hal tersebut membuktikan bahwa variabel independen dan dependen memiliki hubungan sebab dan akibat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dari pengujian *average R-Squared* (ARS) diperoleh hasil sebesar 0,559 dengan nilai $P = 0,001 < 0,005$ sehingga hasil tersebut dapat memenuhi kriteria untuk menilai besarnya pengaruh variabel eksogen, endogen,

tergantung dan pemoderasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel dalam penelitian ini mampu mempengaruhi variabel endogen sebesar 55,9% dan sisanya sebesar 44,1% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model. Selain itu, dari hasil diatas dapat dipeoleh nilai *Average block VIF* sebesar 2,187, dengan nilai $P < 5$, hal ini menunjukkan bahwa AVIF dapat diterima dan tidak terjadi multikolinieritas. Oleh karena itu, maka model penelitian ini dapat memenuhi kriteria dan bisa digunakan untuk memprediksi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.



Gambar 6
Hasil pengujian hipotesis

PEMBAHASAN

Hasil pengujian dari SEM WardPLS pada Gambar 6 diketahui bahwa dana otonomi khusus berpengaruh signifikan positif terhadap belanja modal. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien sebesar 0,18 dengan tingkat signifikansi $0,08 < 0,1$ sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama (H1) yang menyatakan dana otonomi khusus berpengaruh positif terhadap belanja modal diterima. Nilai koefisien sebesar 0,18 artinya peningkatan dana otonomi khusus sebesar 1 rupiah akan berpengaruh pada belanja modal sebesar 18 persen. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Sumardjoko (2014), yang menjelaskan bahwa Dana otonomi khusus berpengaruh signifikan positif terhadap belanja modal APBD Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat periode tahun 2002-2012. Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian Cut Sri Hartati (2016), yang hasilnya menjelaskan bahwa Penerimaan Dana Otonomi Khusus dan TDBH Migas berpengaruh positif baik secara bersama-sama maupun secara parsial terhadap belanja modal Kabupaten/kota di Aceh.

Pengujian SEM WardPLS pada Gambar 6 diketahui bahwa dana otonomi khusus berpengaruh signifikan positif terhadap belanja modal. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai koefisien sebesar 0,26 dengan tingkat signifikansi $0,02 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua (H2) yang menyatakan dana otonomi khusus berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia diterima. Nilai koefisien sebesar 0,26 artinya peningkatan dana otonomi khusus sebesar 1 rupiah akan berpengaruh pada indeks pembangunan manusia sebesar 26 persen. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Cut Sri Hartati (2016), yang menjelaskan bahwa penerimaan dana otonomi khusus, TDBH migas dan belanja modal baik secara bersama sama maupun secara parsial berpengaruh terhadap IPM kabupaten/kota di Aceh.

Hasil pengujian SEM WardPLS pada Gambar 6 diketahui bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan positif terhadap belanja modal. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien sebesar 0,23 dengan tingkat signifikansi $0,03 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal diterima. Nilai koefisien sebesar 0,23 artinya peningkatan pendapatan asli daerah sebesar 1

rupiah akan berpengaruh pada belanja modal sebesar 23 persen. Hasil penelitian ini mendukung penelitian oleh Kusnandar dan Siswanto (2011), yang menyimpulkan bahwa Pendapatan asli daerah sangat berpengaruh terhadap alokasi belanja modal bahkan pada tingkat keyakinan 99% ($\alpha=1\%$).

Pengujian SEM WardPLS pada Gambar 6 diketahui bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan positif terhadap indeks pembangunan manusia. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien sebesar 0,73 dengan tingkat signifikansi $0,01 < 0,01$ sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat (H4) yang menyatakan pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia diterima. Nilai koefisien sebesar 0,73 artinya peningkatan pendapatan asli daerah sebesar 1 rupiah akan berpengaruh pada belanja modal sebesar 73 persen. Hasil penelitian ini mendukung penelitian oleh Syahril (2011), yang menemukan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Berdasar hasil pengujian SEM WardPLS pada Gambar 6 diketahui bahwa dana dana perimbangan berpengaruh signifikan positif terhadap belanja modal. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien sebesar 0,73 dengan tingkat signifikansi $0,01 < 0,01$ sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kelima (H5) yang menyatakan dana dana perimbangan berpengaruh positif terhadap belanja modal diterima. Nilai koefisien sebesar 0,73 artinya peningkatan dana perimbangan sebesar 1 rupiah akan berpengaruh pada belanja modal sebesar 73 persen. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Darmayasa (2014), yang menemukan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal (DBH dan DAU merupakan faktor penentu alokasi Belanja Modal). Studi lain yang dilakukan Abdullah dan Halim (2003), menemukan bukti empiris bahwa dalam jangka panjang transfer berpengaruh terhadap belanja modal dan pengurangan jumlah transfer dapat menyebabkan penurunan dalam pengeluaran belanja modal.

Berdasar hasil pengujian SEM WardPLS pada Gambar 6 diketahui bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien sebesar -0,10 dengan tingkat signifikansi

0,22 > 0,1 sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis keenam (H6) yang menyatakan dana perimbangan berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia ditolak. Nilai koefisien sebesar -0,10 artinya penurunan varians atau nilai dana perimbangan sebesar 1 rupiah akan mengakibatkan penurunan pada indeks pembangunan manusia sebesar 10% persen. Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian Riva Uba Hararap (2011), yang menemukan bahwa DAU, DAK, dan DBH secara simultan berpengaruh positif terhadap IPM.

Pengujian SEM WardPLS pada Gambar 6 menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan negatif terhadap indeks pembangunan manusia. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien sebesar -0,27 dengan tingkat signifikansi $0,02 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketujuh (H7) yang menyatakan belanja modal berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia ditolak. Nilai koefisien sebesar -0,27 artinya penurunan belanja modal sebesar 1 rupiah akan berpengaruh pada penurunan indeks pembangunan manusia sebesar 27% persen. Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian oleh Suparwati (2012), yang menemukan bahwa Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Pengujian SEM WardPLS pada Gambar 6 menunjukkan bahwa belanja modal memediasi dapat secara parsial pengaruh dana otonomi khusus terhadap indeks pembangunan manusia. Hal ini dapat dilihat pada hasil p-value dari pengaruh dana otonomi khusus terhadap belanja modal dengan tingkat signifikansi $0,08 < 0,1$; pengaruh dana otonomi khusus terhadap indeks pembangunan manusia dengan tingkat signifikansi $0,02 < 0,05$, dan pengaruh dari belanja modal terhadap indeks pembangunan manusia dengan tingkat signifikansi $0,02 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedelapan (H8) yang menyatakan bahwa belanja modal memediasi pengaruh dana otonomi khusus terhadap indeks pembangunan manusia diterima. Hasil penelitian ini mendukung penelitian oleh Sumardjoko (2014), yang menunjukan bahwa belanja modal berperan sebagai variabel intervening dalam memberikan pengaruh dana otonomi khusus terhadap IPM.

Hasil pengujian SEM WardPLS pada Gambar 6 menunjukkan bahwa belanja modal dapat memediasi secara parsial pengaruh pendapatan asli daerah terhadap indeks pembangunan manusia. Hal ini dapat dilihat pada hasil p-value dari pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal dengan tingkat signifikansi $0,03 < 0,05$; pengaruh pendapatan asli daerah terhadap indeks pembangunan manusia dengan tingkat signifikansi $0,01 < 0,01$ dan pengaruh dari belanja modal terhadap indeks pembangunan manusia dengan tingkat signifikansi $0,02 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kesembilan (H9) yang menyatakan bahwa belanja modal memediasi pengaruh pendapatan asli daerah terhadap indeks pembangunan manusia diterima. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Setyowati dan Suparwati (2012), yang menemukan bahwa pendapatan asli daerah terbukti berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.

Hasil pengujian SEM WardPLS pada Gambar 6 menunjukkan bahwa belanja modal dapat memediasi secara sempurna pengaruh dana perimbangan terhadap indeks pembangunan manusia. Hal ini dapat dilihat pada hasil p-value dari pengaruh dana perimbangan terhadap belanja modal dengan tingkat signifikansi $0,01 < 0,01$; pengaruh dana perimbangan terhadap indeks pembangunan manusia dengan tingkat signifikansi $0,22 > 0,1$ dan pengaruh dari belanja modal terhadap indeks pembangunan manusia dengan tingkat signifikansi $0,02 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kesepuluh (H10) yang menyatakan bahwa belanja modal memediasi pengaruh dana perimbangan terhadap indeks pembangunan manusia diterima. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Wandira (2013), yang menjelaskan bahwa pendapatan daerah berupa dana perimbangan (transfer daerah) dari pusat menuntut daerah membangun dan mensejahterakan rakyatnya melalui pengelolaan kekayaan daerah yang proposional dan profesional serta membangun infrastruktur yang berkelanjutan, salah satunya pengalokasian anggaran ke sektor belanja modal.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasar hasil penelitian dan pembahasan, maka disimpulkan bahwa 1) Dana otonomi khusus berpengaruh

positif dan signifikan terhadap belanja modal; 2) Dana otonomi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia; 3) Pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal; 4) Pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia; 5) Dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Ini menunjukkan bahwa dana perimbangan dapat mempengaruhi belanja modal karena pemerintah mampu mengalokasikan dana perimbangan secara efektif; 6) Dana perimbangan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia; 7) Belanja modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia; 8) Belanja modal dapat memediasi secara parsial pengaruh dana otonomi khusus terhadap indeks pembangunan manusia; 9) Belanja modal dapat memediasi secara parsial pengaruh pendapatan asli daerah terhadap indeks pembangunan manusia; dan 10) Belanja modal dapat memediasi secara sempurna pengaruh dana perimbangan terhadap indeks pembangunan manusia.

Saran

Penelitian ini belum dapat menjelaskan secara spesifik fungsi dari setiap realisasi belanja yang ikut memberi pengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Penelitian ini hanya terbatas pada realisasi belanja modal khususnya belanja publik sehingga hasil yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh negatif terhadap indeks pembangunan manusia. Hal lain yang ikut berpengaruh adalah kebijakan pemerintah dalam mengalokasikan belanja modal yang masih belum tepat pada sasaran. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menunjukkan bahwa variabel dana perimbangan memberikan pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Hal ini disebabkan karena dalam penelitian ini belum dipisahkan secara spesifik alokasi dana perimbangan apa yang tepat digunakan untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia. Dalam hal tersebut, dana perimbangan terdiri dari dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil. Penelitian ini hanya menggunakan total dana perimbangan untuk menguji dan menganalisis pengaruhnya terhadap belanja modal dan IPM.

Berdasar telaah pelaksanaan otonomi daerah dan pelaksanaan desentralisasi fiskal, serta hasil dari penelitian dan simpulan maka disampaikan saran 1) pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat meneliti secara spesifik setiap fungsi belanja yang ikut berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia selain belanja modal; 2) Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menguji secara spesifik alokasi dana perimbangan yang lebih tepat dialokasikan untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia, seperti DAU, DAK, dan DBH.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Syukriy dan Abdul Halim. 2004. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali. Yogyakarta: *Jurnal Ekonomi STE1*No.2/Th. XIII/25/ April-Juni 2004: 90-109.
- Abdullah dan Solichin. 2006. Studi atas belanja modal pada anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan Volume 2 No. 2: 17-32*.
- Arikunto S. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Badrudin, Rudy. 2012. *Ekonomi Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- BPS Provinsi Papua Barat. 2011. *Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua Barat 2011*. BPS BPS Provinsi Papua Barat, Manaokwari.
- Brata, Aloysius Gunadi, 2004. *Analisis Hubungan Imbal Balik Antara Pembangunan Manusia dan Kinerja Ekonomi Daerah Tingkat II di Indonesia*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian Universitas Atma Jaya.
- Christy, Fhino Andrea dan Priyo Hari Adi. 2009. *Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Be-*

- lanja Modal dan Kualitas Pembangunan Manusia*. The 3rd. National Conference UKWMS, Surabaya.
- Cut Sri Hartati, Dr. Syukri Abdullah, dan Dr. Mulia Saputra. 2016. Pengaruh Penerimaan Dana Otonomi Khusus Dan Tambahan Dana Bagi Hasil Migas Terhadap Belanja Modal Serta Dampaknya Pada Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Di Aceh. *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*- ISSN 2302-01642 pp 12- 23.
- Darmayasa, 2014. Faktor Penentu Alokasi Belanja Modal dalam APBD. Simposium Nasional Akuntansi. September 2014.
- Ghozali, Imam. 2012. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 20* Edisi 6. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Handayani Kristina. 2008. Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah Bidang Pendidikan pada Kabupaten/Kota di Sulawesi. Fakultas Ekonomi Sebelas Maret Surakarta.
- Harahap, Riva Ubar. 2011. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota Propinsi Sumatera Utara. Tesis. Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Harianto, David dan Priyo Hari Adi, 2007. Hubungan antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan per Kapita. Simposium Nasional Akuntansi X Makassar 26-28 Juli 2007.
- Hirawan. 2007. Hirawan, Susiyati Bambang. (2007). *Desentralisasi Fiskal sebagai Suatu Upaya Meningkatkan Penyediaan Layanan Publik (Bagi Orang Miskin) di Indonesia*. Pidato pada Upacara Pengukuhan sebagai Guru Besar Tetap dalam bidang Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Indriantoro dan Supomo. 1999. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Edisi Pertama. BPFE Yogyakarta.
- Intisari. 2011. Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota Di Provinsi DIY tahun 2008-2010. *Tesis*.
- Irwanti. 2014. Pengaruh Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua tahun 2008-2012. *Tesis*.
- Jiwatami. 2011. Pengaruh Kemandirian Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Pegawai terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah (Pada Kabupaten/Kota di Indonesia Periode 2008-2012).
- Kusnandar & Dodik Siswantoro. 2012. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal.
- Lincoln Arsyad. (2004) *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Lugastoro, Dectra Pitron. 2013. *Analisis Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Jawa Timur* (Tesis). Semarang: Universitas Diponegoro.
- Mahbub Ul Haq. 1995. *Reflections on Human Development, 1st Edition*. Oxford University Press. New York.
- Marhaeni. 2008. Marhaeni, Harmawanti; Sri Yati dan Bambang Tribudhi M. 2008. Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2006-2007. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

- Mualim, Mus. 2010. Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Peran Kelembagaan Dana Otonomi Khusus Papua Di Provinsi Papua Barat. [Publikasi Ilmiah]. Malang: Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang.
- Ndadari dan Adi. 2008. Perilaku Asimetris Pemerintah Daerah terhadap Transfer Pemerintah Pusat. *The 2nd National Conference UKWMS Surabaya, 6 September 2008*.
- Palito. 2011. "Konsep Otonomi Khusus" Artikel dalam <http://www.boyyendratamin.com/2011/12/otonomi-khusus-sebagai-kebijakan.html>
- Oates, W. E., 1995. Fiscal Decentralization and Economic Development National Tax Journal, LXVI (2):237-43.
- Rudy Badrudin dan Mufidhatul Khasanah. 2011. Pengaruh pendapatan dan belanja daerah Terhadap pembangunan manusia di provinsi Daerah istimewa yogyakarta. *Buletin Ekonomi Vol. 9, No. 1*.
- Saragih, Juli Panglima. 2003. Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Setyowati, Lilis dan Yohana Kus Suparwati. 2012. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, DAU, DAK, PAD dengan Pengalokasian Anggaran Belanja Modal sebagai Variabel Intervening (Studi Empiri pada Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Jawa Tengah). *Jurnal Prestasi Vol. 9 No. 1*.
- Sularso, Sri. 2003. *Buku Pelengkap Metode Penelitian Akuntansi: Sebuah Pendekatan Replikasi*, BPFY-Yogyakarta.
- Sumardjoko, Imam. 2013. *Pengaruh Penerimaan Dana Otonomi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Papua dan Papua Barat Dengan Belanja Modal Sebagai Intervening*. Simposium Nasional Akuntansi XIV Lombok.
- Syahril. 2011. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Medan.
- UNDP, 1990. *Human Development Report 1990*. Oxford University Press. New York.
- Wandira, Arbie Gugus. 2013. Pengaruh PAD, DAU, DAK dan DBH terhadap Pengalokasian Belanja Modal. *Accounting Analysis Journal*. 1 (3): 45-5.